

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75 Tahun 1959).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38888).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014.

B. Buku

Achmad Ali, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002).

Arie Sukanti Hutagalung, *“Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah”*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005)..

A.P Parlindungan, *“Hak Pengelolaan menurut Sistem UUPA”*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).

_____, *“Pendaftaran Tanah di Indonesia”*, (Bandung: Mandar Maju, 1998).

Budi Harsono, *“Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2019).

Bushar Muhammad, *“Pokok-Pokok Hukum Adat”*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

CST Kansil, *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

_____, Christine, S.T Kansil, Engelian, Palendang dan Godlieb N. Mamahit, *“Kamus Istilah Hukum”*, (Jakarta, 2009).

H. Salim, *“Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Ishaq, *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jabalnur, "*Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi dan Perlindungan Hukumnya)*", (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Maria S.W. Sumardjono, "*Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*", (Jakarta: Kompas, 2008).

Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret).

Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2008).

Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Riduan Syahrani, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", (Bandung: Penerbit Citra Bakti, 1999).

Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 1986).

_____ dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Soetiono, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004).

Sudikno Mertokusumo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

_____, "*Hukum dan Politik Agraria*", (Jakarta: Karunika, 2008).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Urip Santoso, "*Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*", (Jakarta: Kencana, 2011).

Winahyu Erwiningsih, "*Hak Menguasai Negara Atas Tanah*", (Yogyakarta: Total Media, 2009).

C. Jurnal

Ahyar Ari Gayo, “Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)”, *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, Vol. 18, No. 3, September 2018, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>

Dewa Gede Atmaha, “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, 2018.

Dwi Afni Maileni, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Diatas Hak Pengelolaan di Kota Batam”, *Jurnal Hukum De'rechtstaat*, Vol. 5, No. 1, 2019, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.121>

Febrianita Dinar Pramesti dan I Made Dedy Priyanto, “Analisis Yuridis Terhadap Probelamtika Status Kepemilikan Tanah di Kota Batam”, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 11, No. 5, 2023.

Gilbert Adytia Rohi, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Ulayat Desa Adat (Studi Kasus di Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2022.

Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum”, *Journal of Judicial Review*, Desember 2022.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, 2019, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

D. Hasil Penelitian

Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang, “Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang”, Jakarta, September 2023.

Tjahjo Arianto, Asih Retno Dewi, dan Harvini Wulansari, “Menata Pendaftaran Tanah Kota Batam Untuk Penyelesaian Permasalahan Penguasaan Tanah Kampung Tua yang Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan”, Laporan Penelitian Sistematis, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2016.

Tim Dibawah Pimpinan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H, “Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat”, Laporan Penelitian, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.

Tanjung Nugroho, Tjahjo Arianto dan Eko Budi Wahyono, “Permasalahan Penguasaan Tanah Perkampungan Tua Kota Batam”, Yogyakarta: Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat Tahun 2019, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2019.

E. Website/Internet

Administrator, “Memahami Mekanisme Pembebasan Tanah Proyek Nasional”, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7667/memahami-mekanisme-pembebasan-tanah-proyek-nasional?lang=1>, diakses 2 Desember 2023.

Ahmad Rival Kasim, “Pakar: Pulau Rempang Bukan Permukiman Tanah Adat, Tapi Kawasan Hutan”, <https://www.rri.co.id/hukum/364260/pakar-pulau-rempang-bukan-permukiman-tanah-adat-tapi-kawasan-hutan>, diakses pada 25 November 2023.

Arjuna, “Kerap Jadi Polemik, Pemko Batam Gesa Legalitas 29 Titik Kampung Tua”, <https://www.batamnews.co.id/berita-97732-kerap-jadi-polemik-pemko-batam-gesa-legalitas-29-titik-kampung-tua.html>, diakses 2 Desember 2023.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), “Proyek Pengembangan Pulau Rempang Masuk Daftar Program Strategis Nasional”, <https://bpbatam.go.id/proyek-pengembangan-pulau-rempang-masuk-daftar-program-strategis-nasional/>, diakses 22 Oktober 2023.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), “Deretan Keuntungan Rempang Eco City”, <https://bpbatam.go.id/deretan-keuntungan-rempang-eco-city/>, diakses 22 Oktober 2023.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), “Napak Tilas Pembangunan Batam dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam”, <https://bpbatam.go.id/profil/latar-belakang/>, diakses 23 Oktober 2023.

Gianie, “Rempang, Proyek Strategis Nasional, dan Luka Sosial”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/18/rempang-proyek-strategis-nasional-dan-luka->

Tim CNN Indonesia, “Walhi Respons Menteri Hadi Sebur Warga Rempang Tak Punya Sertifikat”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230915071336-12-999280/walhi-respons-menteri-hadi-sebur-warga-rempang-tak-punya-sertifikat> , diakses 21 September 2023.

Sukarno W. Sumarto, “Proyek Strategis Nasional (PSN)”, <https://www.bkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN>, diakses 17 Oktober 2023.

